

REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS YOGYAKARTA

HOMELESS AND BEGGAR SOCIAL REHABILITATION AT BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS YOGYAKARTA

Oleh: Yulinda Prasetyo dan Utami Dewi,.S.I.P,M.PP

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, yulindapr@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rehabilitasi sosial dan mengetahui faktor penghambat dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Balai RSBKL Yogyakarta belum berjalan dengan optimal berdasarkan dari tahapan rehabilitasi sosial, yaitu tahap rehabilitasi, tahap resosialisasi dan tahap pembinaan lanjut. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya jumlah warga binaan yang dapat lolos dalam tahapan pembinaan lanjut. Adapun faktor penghambat yang muncul adalah human nature dari dalam diri warga binaan yang sulit dirubah, jumlah pekerja sosial yang kurang sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada, peraturan yang mengatur gelandangan dan pengemis belum terlaksana secara optimal serta stigma negatif masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis, sehingga tidak ada kemauan yang kuat dari dalam diri warga binaan untuk keluar dari zona menggelandang dan mengemis.

Kata Kunci: rehabilitasi sosial, gelandangan dan pengemis.

ABSTRACT

This research aimed to describe and analyse homeless and beggar social rehabilitation and to examine the inhibitor factors on the social rehabilitation at Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta. The design of the research used descriptive method with qualitative approach. The result of this research indicated that homeless and beggar social rehabilitation at Balai RSBKL Yogyakarta has not operated well yet. It based on the stages of social rehabilitation, stages ofresocialization and stages of further guidance. It has been proven by a small amount of assisted citizens who can passfurther guidance. Meanwhile, the factors of inhibitor occur because of there was human nature from assisted citizens who are difficult to change and the number of a social workers that was less proportional than the number of assisted citizens. It also due to the homelessness and beggars regulationshad not been carried out optimally and the negative stigma of them. Therefore, there was no strong will in them in order to get out of the vagrancy and begging zone.

Keyword: Social rehabilitation, homeless and beggar.

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat tentu menghendaki kondisi kehidupan yang aman tentram dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Kondisi seperti itu lazim disebut dengan sejahtera. Sejahtera merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan maka yang harus dijadikan prioritas adalah dengan menyelesaikan permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial adalah adanya gelandangan dan pengemis.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis disebutkan bahwa Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu contoh daerah yang

mengalami dilema atas permasalahan gelandangan dan pengemis. Daya tarik pusat pendidikan dan pariwisatanya, mengakibatkan banyak orang baru yang datang dengan tujuan yang beragam, salah satunya dengan mengemis dan menggelandang. Menurut data dari Dinas Sosial DIY jumlah PMKS Terkelompok dari tahun 2016 s.d Februari 2019 digambarkan pada tabel 1:

Tabel 1. Data Jumlah PMKS Terkelompok di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sejak Tahun 2016 s.d 28 Februari 2019

No	Jenis PMKS Terkelompok	2016	2017	2018	2019
1	Gelandangan	483	426	278	65
2	Psikotik	278	143	153	33
3	Pengemis	108	147	176	34
4	Pemulung	9	2	2	0
5	Bukan Sasaran	32	19	6	1
Total		910	737	615	133

Sumber: Dinas Sosial DIY (2019)

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa eksistensi dari gelandangan dan pengemis ini terus ada. Jumlah gelandangan dan pengemis ini selalu berubah-ubah karena mobilitas mereka yang tinggi, terutama ketika pada Hari Jum'at ataupun pada hari-hari besar jumlah pengemis bisa meningkat tinggi. Adanya gelandangan dan pengemis merupakan suatu gejala sosial

yang disebabkan oleh faktor kompleks. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis diantaranya ialah merantau dengan modal nekad, malas berusaha, cacat fisik, biaya pendidikan yang mahal, tidak adanya lapangan pekerjaan, tradisi yang turun-temurun, serta adanya prinsip mengemis daripada menganggur (Dimas, 2013:7-14).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis menyebutkan bahwa baik pengemis maupun yang memberi uang akan dikenakan pidana. Peraturan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah gelandangan dan pengemis. Namun di Daerah Istimewa Yogyakarta peraturan tersebut belum diterapkan secara penuh mengakibatkan pengguna jalan yang iba sering memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan pengemis memiliki keterbatasan ketrampilan, keterbatasan pendidikan, dan keterbatasan fasilitas, maka keberadaan mereka diperkotaan dianggap sebagai masalah sosial. Oleh karena hal tersebut, salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yaitu dengan memberikan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial adalah proses

refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (BBRSBG Kartini Temanggung, 2016:2).

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta adalah salah satu unit pelayanan teknis Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah koordinasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas hidup, kepedulian, dan ketahanan sosial masyarakat terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta memakai sistem pelayanan sosial dalam panti. Semua warga binaan tinggal di asrama dengan fasilitas pemberian makan, pakaian, perawatan kesehatan, bimbingan mental, sosial, rohani, serta keterampilan,

Menurut Sri Yuni (2008:9), rehabilitasi sosial yaitu suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

Sedangkan menurut Karnadi dan Sadiman, (2014:240), rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu “re” yang berarti “kembali” dan “habilitasi” yang berarti “kemampuan”. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan upaya pemulihan yang diberikan kepada klien dari gangguan kondisi fisik, psikis dan sosial, agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Balai RSBKL Yogyakarta, rehabilitasi sosial melaksanakan rangkaian kegiatan antara lain bimbingan mental dengan pemberian bimbingan secara teori di dalam kelas dan konsultasi harian bersama pekerja sosial. Selain itu, pemberian bimbingan fisik dengan melakukan apel setiap pagi dan senam sehat setiap satu minggu sekali. Kemudian, pemberian bimbingan keterampilan dengan bimbingan yang diberikan secara teori dan praktek.

Permasalahan yang terjadi ialah, banyak ditemukan PMKS kembali lagi menjadi gelandangan dan pengemis, setelah usai mendapatkan rehabilitasi sosial. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada PMKS,

yaitu lemahnya mental yang dimiliki oleh para PMKS sehingga tidak ada kemauan yang kuat untuk keluar dari jalanan. Selain itu, jumlah pekerja sosial yang kurang seimbang dengan jumlah warga binaan, serta metode pemberian layanan bimbingan yang kurang tepat sasaran.

Proses rehabilitasi sosial melalui beberapa tahapan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tahapan rehabilitasi sosial menurut Munawir Yusuf (1996:148-149), yaitu:

1. Tahap Rehabilitasi
2. Tahap Resosialisasi
3. Tahap Pembinaan Lanjut

Teori tahapan rehabilitasi sosial dari Munawir Yusuf (1996:148-149) dipilih karena dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana tahapan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta.

Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan dan rekomendasi kepada Dinas Sosial DIY, Balai RSBKL Yogyakarta serta masyarakat untuk lebih meningkatkan peran masing-masing dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 Januari 2019 sampai 6 April 2019 dengan lokasi penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta terletak di Jalan Sidomulyo, TR IV/369, Tegalgrejo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah 1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY, 2) Pekerja Sosial Balai RSBKL, 3) Analisis Perencanaan Program dan Anggaran Balai RSBKL, 4) Pengelola Rehabilitasi Sosial Balai RSBKL, 5) Praktisi Bimbingan dan 6) Warga Binaan Sosial Balai RSBKL Yogyakarta.

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data dokumen dari aktor yang terlibat yang didapat di lokasi penelitian.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data dan 4) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis di Balai RSBKL Yogyakarta

Hasil penelitian yang diperoleh menggambarkan bahwa secara umum Balai RSBKL Yogyakarta telah dapat memberikan pelayanan program kepada kliennya sesuai prosedur yang ditetapkan, namun praktek pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada kesenjangan antara teori atau konsep dengan praktek yang bisa dilakukan.

Sehingga lembaga ini kurang berhasil mengemban misinya, yaitu mengentaskan gepeng dari masalahnya.

Menurut Nurdin Widodo (2012:347) rehabilitasi adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikologis dan penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial dan vokasional bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan. Dimana pada prosesnya diarahkan untuk: 1) Mencapai perbaikan penyesuaian klien sebesar-besarnya, 2) Kesempatan vokasional sehingga dapat bekerja dengan kapasitas maksimal, 3) Penyesuaian diri dalam lingkungan perorangan dan sosial secara memuaskan sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat.

Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Balai RSBKL Yogyakarta merupakan upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang bertujuan untuk memulihkan kembali integritas diri, percaya diri, disiplin, kesadaran dan tanggungjawab terhadap masa depan dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, juga memulihkan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan

fungsi dan peran sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta diukur dengan teori tahapan rehabilitasi sosial menurut Munawir Yusuf (1996) sebagai berikut:

1. Tahap Rehabilitasi

Tahapan rehabilitasi ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

a. Tahap Pendekatan Awal

Tahap Pendekatan Awal merupakan tahap awal dari rehabilitasi yang berupa pengenalan program, sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait, perekrutan warga binaan sosial, orientasi, identifikasi, motivasi, dan seleksi. Dinas Sosial DIY melakukan orientasi berupa pencarian data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan memperoleh dukungan dan rujukan dari berbagai pihak seperti masyarakat, hasil razia Satpol PP, dan datang atas kemauan sendiri.

Tahap selanjutnya adalah motivasi dan seleksi memiliki tujuan menumbuhkan kemauan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menetapkan calon

penerima layanan rehabilitasi. Dinas Sosial DIY melakukan motivasi calon warga binaan sosial, untuk memberi arahan, sosialisasi kepada calon warga binaan sosial di camp assessment dan persetujuan keluarga agar bersedia mengikuti program rehabilitasi di Balai RSBKL Yogyakarta. Seleksi ditetapkan dalam berbagai persyaratan yang harus dipenuhi calon warga binaan sosial.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI nomor 22 tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial pasal 20 ayat 4 dan 5 yang menyatakan bahwa motivasi merupakan upaya penumbuh kesadaran dan minat penerima layanan dan dukungan keluarga untuk mengikuti rehabilitasi sosial. Sedangkan seleksi merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima layanan dengan melibatkan orang-orang yang ahli dibidangnya dalam menyeleksi calon warga binaan sosial.

Tahap pendekatan awal yang terdapat di Balai RSBKL Yogyakarta sesuai dengan tahapan

pelayanan sosial dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (2007), bahwa pendekatan awal merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau dukungan dari pihak-pihak terkait. Selain itu, pendekatan awal meliputi proses pencarian calon klien (rekrutmen), seleksi dan motivasi. Proses pengambilan dan seleksi tersebut penting karena kualitas sumber manusia tergantung pada kualitas pengambilan dan seleksi.

b. Tahap Penerimaan

Berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (2007) memaparkan tentang penerimaan dalam rehabilitasi sosial merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam program layanan rehabilitasi. Penerimaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Registrasi, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk administrasi dan mengisi data klien. Penempatan dalam program rehabilitasi sosial adalah kegiatan penempatan klien dalam program bimbingan keterampilan kerja klien

berdasarkan pengemlompokan data tentang minat dan bakat klien.

Munawir Yusuf (1996) mengungkapkan bahwa pada tahap penerimaan diawali dengan registrasi digunakan untuk mendapatkan peserta penerima pelayanan dan tersedianya informasi yang menyeluruh tentang kondisi obyektif penerima pelayanan. Hal tersebut serupa dengan penerimaan calon warga binaan sosial yang terdapat di Balai RSBKL.

Tahap penerimaan telah diatur sedemikian rupa dari registrasi, *assessment*, dan penetapan program bimbingan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiyah (2017) dimana pada tahap penerimaan dilakukan seleksi untuk menjadi warga binaan sosial dan dilakukan assesmen awal dan lanjutan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai latar belakang dan permasalahan warga binaan sosial. Hal tersebut penting dilakukan pada tahap penerimaan karena sangat membantu berjalannya proses rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Rehabilitasi gepeng harus dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sebagaimana pada konsep dan praktik. Namun Balai RSBKL sampai saat ini baru memiliki petugas lapangan dari profesi pekerjaan sosial, sedangkan profesi lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program belum ada.

c. Tahap Bimbingan Sosial dan Bimbingan Keterampilan

Bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus supaya mencapai tingkat perkembangan dan penyesuaian diri yang optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa pelaksanaan rehabiilitasi sosial gelandangan dan pengemis melalui Program Tiga Langkah Rehabilitasi (Tilar), menyelenggarakan berbagai macam bimbingan untuk pelatihan.

Berdasarkan identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh pekerja sosial, dapat diuraikan terdapat program pokok bimbingan untuk gelandangan dan pengemis yang diberikan yaitu bimbingan

sosial dan bimbingan keterampilan. Selain dua bimbingan pokok tersebut, terdapat rehabilitasi medis/kesehatan yang dilakukan di Balai RSBKL yang bekerja sama dengan Puskesmas Tegalrejo merupakan program penunjang dan mengiringi segala layanan rehabilitasi sosial melalui layanan di Puskesmas Tegalrejo.

Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Donny Dinardo (2017) dimana dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, bimbingan yang diberikan kepada warga binaan sosial sangat mempengaruhi keberhasilan program. Bimbingan fisik, mental dan sosial harus diberikan dalam porsi yang seimbang sehingga proses rehabilitasi sosial akan dapat berjalan dengan optimal. Untuk bimbingan vokasional atau keterampilan, warga binaan sosial dibebaskan untuk memilih keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

Menurut Harry Hikmat dalam Nurdin Widodo (2012:347) juga menyatakan bahwa di dalam

program rehabilitasi bertugas untuk memulihkan rasa percaya diri dan tanggungjawab terhadap diri dan keluarganya, dan meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kemandiriannya dalam masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan bimbingan yang terdapat di Balai RSBKL.

Bimbingan mental sebagai fokus utama program rehabilitasi di Balai RSBKL, metodenya masih perlu dikaji ulang. Teknik bimbingan mental yang diterapkan lebih mengacu pada aspek transfer pengetahuan, bukan aspek penyadaran mental. Dimana semua warga binaan sosial dari berbagai tingkat pendidikan masuk dalam satu kelas dan diajarkan materi yang sama, sehingga situasinya lebih menyerupai sekolah formal. Bimbingan mental untuk membangun konsep diri yang positif, percaya diri, dan penghargaan diri diperlukan pendekatan individu, teknik konseling yang efektif dan sebagainya. Balai RSBKL sampai saat ini belum mempunyai program

khusus yang secara langsung diarahkan untuk penyadaran mental klien.

2. Tahap Resosialisasi

Tahap resosialisasi merupakan tahap yang dilakukan ketika warga binaan sosial tidak dapat menerima rehabilitasi sosial ke tahap selanjutnya. Resosialisasi ini adalah mengembalikan gelandangan dan pengemis ke wilayah asal mereka. Hal ini bermaksud untuk mengembalikan hak mereka untuk bersosialisasi dan beradaptasi kembali dengan lingkungan asal mereka.

Menurut Munawir Yusuf (1996) tahap resosialisasi ini merupakan bimbingan kesiapan baik pihak klien maupun keluarga/masyarakat lingkungan klien. Tahap resosialisasi ini bertujuan untuk melatih kemampuan penyesuaian diri dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tahap resosialisasi yang terdapat di Balai RSBKL merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah. Arah pertama

adalah mempersiapkan warga binaan sosial agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghipuan masyarakat secara normatif. Kemudian arah kedua adalah untuk mempersiapkan keluarga agar mau menerima kembali warga binaan sosial.

Menurut Soetomo (2010) tahap resosialisasi sama dengan tindakan treatment. Tindakan treatment tidak harus diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan masalah sosial, akan tetapi dalam banyak hal juga dapat berupa usaha untuk mengurangi atau membatasi berkembangnya masalah. Balai RSBKL tetap berupaya memberikan rehabilitasi sosial secara maksimal. Meskipun warga binaan sosial tidak dapat lanjut mendapatkan rehabilitasi ke tahap selanjutnya, selama proses pemulangan, warga binaan sosial tetap diberikan bimbingan oleh CC dengan membantu mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan sosial ketika dipulangkan kepada keluarganya.

3. Tahap Pembinaan Lanjut

Menurut Munawir Yusuf (1996) di dalam tahap pembinaan lanjut terdiri dari bantuan pengembangan usaha dan mengembangkan usaha secara individu maupun berkelompok serta bimbingan pemantapan atau peningkatan usaha, kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan dan mengembangkan usaha secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut sesuai dengan tahap pembinaan lanjut di Balai RSBKL yang dikenal dengan Langkah Pasca Rehabilitasi Sosial (Sirah Gepeng Binjut). Tahap ini juga bertujuan untuk melatih warga binaan sosial untuk mandiri dan mengembangkan usaha atau melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang sudah dipelajari selama satu tahun masa rehabilitasi.

Tahap akhir dari program rehabilitasi yang diberikan selama 6 bulan. Tidak semua warga binaan sosial dapat sampai pada tahap ini, sebagian besar hanya mampu sampai pada tahap kedua (pra bimbingan lanjut) karena tidak memenuhi syarat/kriteria. Warga binaan sosial yang berada di tahap binjut ini sudah bukan warga binaan sosial dari Balai RSBKL lagi, sehingga tidak mendapat jatah makan namun

masih diberikan fasilitas berupa tempat tinggal dan bimbingan.

Permasalahan yang terjadi ialah masih banyak warga binaan sosial yang kembali menggelandang, terdapat beberapa aspek sebagai penyebabnya, diantaranya Balai RSBKL tidak memiliki dana untuk mendukung usaha kerja gepeng, kesempatan bekerja disektor formal sangat sulit, ketrampilan kerja yang diajarkan sangat minim, umumnya dibawah standar pasaran kerja. Oleh karena itu, adanya tahap pembinaan lanjut ini sangat membantu warga binaan sosial sehingga dapat menabung selama 6 bulan.

Faktor Penghambat Rehabilitasi Sosial

Dalam rehabilitasi sosial tentu terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya rehabilitasi. Menurut Moenir (2000) hambatan dalam layanan rehabilitasi terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Balai RSBKL Yogyakarta terdapat hambatan sebagai berikut:

1. *Human Nature* dari dalam diri warga binaan sulit untuk diubah yang menyebabkan mereka akan kembali

hidup menggelandang dan mengemis, sesudah mendapatkan rehabilitasi. Menurut Moenir (2000), hambatan proses rehabilitasi sosial dapat ditinjau dari aspek internal yaitu dari individu penyandang masalah kesejahteraan sosial berupa adanya sikap-sikap negatif yang berasal dari dalam diri seperti tidak mau berusaha dan perasaan rendah diri yang kuat.

2. Jumlah pekerja sosial yang kurang sebanding dengan jumlah warga binaan sosial mengakibatkan rehabilitasi yang diberikan tidak bisa berjalan optimal. Menurut Moenir (2000), proses rehabilitasi sosial yang tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena terdapat hambatan eksternal. Hambatan eksternal yang dimaksud adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang menjalani layanan rehabilitasi, yakni sistem, prosedur, dan metode kerja yang ada tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan serta kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan.
3. Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal yang seharusnya dapat membantu mengentaskan adanya gelandangan dan

pengemis. Namun kenyataannya adalah Perda tersebut belum dilaksanakan secara sepenuhnya karena Pergub yang seharusnya mengikuti pembentukan Perda juga hingga saat ini belum diterbitkan, akibatnya tidak ada disposisi yang jelas untuk melaksanakan Perda tersebut.

4. Stigma negatif masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis, sehingga berdampak pada minimnya peluang kerja bagi warga binaan sosial setelah usai mendapatkan rehabilitasi. Ketidakpercayaan masyarakat sehingga tidak memberikan kesempatan bekerja karena mantan gelandangan atau pengemis. Stigma negatif masyarakat yang membuat mantan gepeng ini kembali ke jalan walaupun sudah menerima layanan rehabilitasi karena tidak ada pilihan lain.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta belum berjalan

dengan optimal berdasarkan dari teori tahapan rehabilitasi sosial menurut Munawir Yusuf, yaitu tahap rehabilitasi, tahap resosialisasi dan tahap pembinaan lanjut. Hal tersebut dibuktikan dengan: 1) sedikitnya jumlah warga binaan yang dapat lolos dalam tahapan pembinaan lanjut, 2) Banyak warga binaan sosial yang kembali lagi hidup menggelandang dan mengemis setelah mendapatkan rehabilitasi sosial, 3) Metode dalam pemberian bimbingan yang kurang tepat sasaran sehingga tidak dapat diterima oleh warga binaan sosial.

Adapun faktor penghambat yang muncul adalah *human nature* dari dalam diri warga binaan yang sulit dirubah, jumlah pekerja sosial yang kurang sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada, peraturan yang mengatur gelandangan dan pengemis belum terlaksana secara optimal serta stigma negatif masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis, sehingga tidak ada kemauan yang kuat dari dalam diri warga binaan untuk keluar dari zona menggelandang dan mengemis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan dari segi pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan sosial, penambahan jumlah pekerja sosial serta meningkatkan kualitas bimbingan di Balai RSBKL, pemberian bimbingan yang lebih beragam akan lebih meningkatkan motivasi dan memberikan dampak positif.
2. Bimbingan mental sebagai fokus utama program rehabilitasi di Balai RSBKL, metodenya juga masih perlu dikaji ulang. Teknik bimbingan mental yang diterapkan lebih mengacu pada transfer pengetahuan, bukan aspek kesadaran mental. Dimana semua klien dari berbagai tingkat pendidikan masuk dalam satu kelas diajarkan materi yang sama, sehingga situasinya lebih menyerupai sekolah formal.
3. Dinas Sosial DIY harus lebih proaktif dalam memberdayakan para gelandangan dan pengemis melalui berbagai kerjasama dan penyaluran kesempatan kerja sehingga terdapat lapak untuk mendukung usaha kerja gepeng.
4. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk mengkaji ulang pelaksanaan Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan

Pengemis, supaya dapat benar-benar terlaksana secara optimal.

5. Masyarakat harus dapat lebih aktif dalam mendukung pemerintah mengatasi persoalan gepeng dengan tidak memberikan uang dijalan, dan menyalurkan bantuan yang ingin diberikan ke berbagai lembaga yang tersedia, serta lebih menerima dan percaya terhadap gepeng pasca rehabilitasi ke dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dahlan, Hanafi. (2008). *Dinamika Anak Terlantar*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Irawan, Dimas Dwi, 2013. *Pengemis Undercover Rahaia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Karnadi & Sadiman A. K. 2014. *Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik Berbasis Masyarakat: (Studi Kasus di Ponpes/Panti REHSOS Nurus Salam Sayung Demak*. Jurnal at-Taqaddum, Vol. 6, No.2..
- Moenir, H.A.S. 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Soetomo, 2010. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Nurdin Dkk. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial : Pembinaan Lanjut (After Care Services) Pasca Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: P3KS Press (Anggota IKAPI).

Widayanti, Sri Yuni Murti. (2008). *Efektivitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal*. Salatiga: Widyasari Press.

Yusuf, Munawir. (1996). *Pendidikan Tunanetra Dewasa dan Pembinaan Karir*. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik

Jurnal/Skripsi/Tesis :

- Sutiayah. 2017. *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Kecakapan Hidup di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (RSBKL) Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dinardo, Donny. 2017. *Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Dokumentasi Resmi :

- Peraturan Menteri Sosial No 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.
- Departemen Sosial, RI, 2007. *Standard Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan*

Pengemis. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Penyandang Disabilitas Intelektual di Lingkungan Keluarga (Buku Pegangan Pendamping Program RSBK).

BBRSBG Kartini Temanggung. 2016.
Mendampingi Orang Tua dan

